

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan Akuntansi Sektor Publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Menurut Bawir (2016:23) perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi Inspektorat pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektivitas penggunaan sumberdaya (*value for money*) dan terlihat secara jelas *outcome* yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah sStandar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kelemahan akuntansi pemerintahan adalah seolah-olah akuntansi pemerintahan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk kepentingan pemerintah (bersifat internal) bukan kepada publik pada hal yang dikelola pemerintah adalah dana atau uang publik. Melihat fenomena yang terjadi di Negara Indonesia yang semakin maraknya : Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sudah waktunya pemerintah bekerja dan menyusun laporan yang akuntabel dengan tujuan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, paling tidak mengurangi (Jaminta, 2017).

Pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas pemerintah. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal organisasi atau lembaga negara yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawas, yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2016:161) membagi pengawasan internal ke dalam beberapa jenis, yaitu pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya). dan pengawasan Fungsional (pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti Itjen, Itwilprop). BPKP dan Bapeka. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam

mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, mencegah kehilangan sumber daya, dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan (Ponamon, 2013).

Berdasarkan hasil pra observasi yang peneliti lakukan, dalam hal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) masih banyak kendala-kendala yang dihadapi Instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU antara lain yaitu menyangkut sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti penyiapan peraturan, sistem, dan infrastruktur yang belum sempurna, kurangnya komitmen pimpinan, banyaknya jumlah satuan kerja yang masih belum memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan, serta belum tersedianya SDM dengan kualitas memadai di bidang keuangan dan akuntansi.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU tahun 2020 ditemukan beberapa temuan. BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Pemkab OKU, sehingga tidak terulang kembali dimasa akan datang, yaitu: (1) Penatausahaan Persediaan pada tiga OPD, dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai; (2) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah kurang memadai; (3) Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak tepat; Kelebihan pembayaran

Gaji dan Tunjangan, kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD, dan kelebihan pembayaran 45 Paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan (5) Sebanyak 373 penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan NIK ganda (<https://sumsel.bpk.go.id/?p=30327>). Dengan adanya temuan BPK tersebut, menunjukkan lemahnya pengelolaan pada Sistem Pengendalian Intern. Pada prakteknya pemerintah Kabupaten OKU sering tidak konsisten dalam menjalankan SPIP. Permasalahan di Kabupaten OKU secara umum terlihat pada lemahnya pengendalian intern kegiatan SKPD dan pemerintah kabupaten yang seharusnya dilaksanakan tapi belum diterapkan dengan optimal. Adanya temuan berulang serta penatausahaan dan pengelolaan Aset tetap belum memadai, belum dibuat Satuan Tugas SPIP serta berbagai kelemahan Sistem Pengendalian Intern lainnya. Hal ini disebabkan oleh keandalan SPIP masih berbeda dari masing-masing SKPD serta efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Alamanda (2012) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu melalui pengawasan internal pada organisasi pemerintahan guna membenahi dan mengurangi kasus tentang buruknya kinerja pemerintah daerah. Penelitian Alamanda juga didukung oleh Sukmana dan Anggarsari (2009). Penelitian ini menyatakan dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan

pemerintahannya, sehingga kinerja pemerintah daerah yang baik dapat dilihat juga dari penilaian pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan Akuntansi Sektor Publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi Inspektorat pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten OKU”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada Pengaruh signifikan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Pengaruh signifikan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Baturaja khususnya Program Studi Akuntansi tentang Pengaruh signifikan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, dan Pengawasan Internal terhadap kinerja instansi Inspektorat sehingga dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kinerja instansi Inspektorat.